

BAB I

Pendahuluan

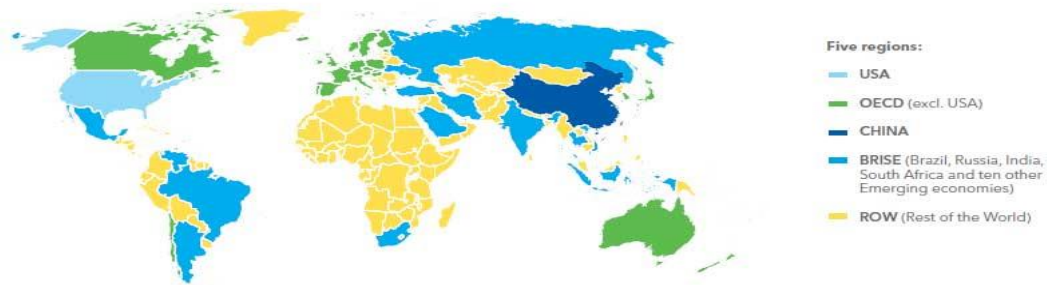
1.1. Latar Belakang

Sebagai suatu negara yang memiliki lebih dari 1,3 milyar penduduk, Tiongkok masih memiliki masalah pangan yang cukup signifikan. Masalah ketahanan pangan akan menjadi lebih sulit bagi Tiongkok di tahun-tahun yang akan datang karena beberapa faktor seperti populasi Tiongkok yang terus meningkat diikuti dengan kebutuhan pangan yang terus bertambah pula. Selain itu, kuantitas makanan bukanlah satu-satunya masalah di Tiongkok, melainkan kualitas makanan yang juga menjadi faktor penting dalam ketahanan pangan Tiongkok sendiri. Selama lima tahun terakhir, persediaan bahan pangan bagi 1,3 milyar warga Tiongkok menipis dan harga bahan pangan terus melonjak (DW, 2008) dan hal ini menimbulkan pertanyaan apakah makanan di Tiongkok aman dan cukup untuk dikonsumsi oleh penduduknya.

Setelah berakhirnya *Millennium Development Goals (MDGs)* pada tahun 2015, negara-negara yang ada di dunia mulai membuat suatu formulasi pembangunan berkelanjutan yang baru untuk meneruskan *MDGs* sebelumnya. Untuk itu dibentuklah suatu pertemuan besar di markas besar Persekutuan Bangsa Bangsa di New York yang dihadiri oleh representasi dari 193 negara. Konferensi tingkat tinggi yang dinamakan *Sustainable Development Summit* ini sukses dalam membuat sebuah dokumen yang dinamakan Sustainable Development Goals (*SDGs*). Pada saat itu, setidaknya 193 anggota PBB mengadopsi dokumen aklamasi yang berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” (UN, Sustainable Development Goals Knowledge Platform, 2015) atau dengan kata lain agenda dari pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai kelak pada tahun 2030. Baik *SDGs* dan *MDGs* sebenarnya memiliki persamaan dalam hal ide. Sebagai contohnya, salah satu tujuan dari kedua *global goals* ini adalah untuk mengatasi kelaparan (*Zero Hunger*). Namun, terdapat target yang lebih spesifik dalam *SDGs* itu sendiri dalam pencapaiannya di tahun mendatang, sehingga akan sangat penting bagi negara-negara yang ada di dunia khususnya negara anggota PBB untuk patuh dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan agar dapat memenuhi target-target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030.

Presiden Xi Jinping pada September 2015 turut ikut serta dalam menghadiri *United Nations Sustainable Development Summit*, dan setelah *SDGs* resmi terbentuk, pemerintah Tiongkok sendiri mengintegrasikan *Sustainable Development Goals* PBB dengan Rencana 5 tahun Tiongkok (*13th Five Year Plan for Economic and Sosial Development*) serta rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang lainnya. Tiongkok, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu sebanyak 1,3 milyar penduduk dan akan terus (UN, Worldometer, 2019) memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri dalam pengimplementasian *Sustainable Development Goals* di negaranya khususnya dalam hal meningkatkan ketahanan pangan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas ekonomi selama dua dekade terakhir membuat jumlah orang yang kekurangan nutrisi berkurang secara drastis (UNDP, 2017) dan banyak negara berkembang yang sebelumnya mengalami kelaparan dan kekurangan gizi sekarang dapat memenuhi kebutuhan pangannya. Tiongkok sudah membuat komitmen dalam memegang tanggung jawab untuk mengimplementasikan agenda 2030 pembangunan berkelanjutan dan akan melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan pembangunan global secara berkala. Pada September 2016, Tiongkok mengeluarkan *Tiongkok's National Plan on Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development*. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah Tiongkok sudah mengimplemetasikan agenda 2030 pembangunan berkelanjutan di beberapa sektor secara khusus sektor pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan (*food security*)

Gambar 1.1 Prediksi yang dibuat oleh DNV GL dalam UN Private Sektor Forum.



Sumber: DNV GL, 2016

Dalam *official website*-nya, DNV GL – sebuah perusahaan yang bergerak di bidang inovasi dan teknologi membuat prediksi kemungkinan tercapainya *goals* dari tiap tiap negara anggota PBB dalam *UN Private Sektor Forum* pada September 2016 (Lihat Gambar 1). Dari indikator yang ada, negara negara anggota dikelompokkan menjadi lima *region* yang dibuat berdasarkan ukuran negara dan kekuatan ekonominya yaitu Amerika, OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) yang terdiri dari 36 negara anggota, China, BRISE (Brazil, Russia,

India, South Africa, and ten other Emerging economies), dan ROW (Rest of the World). Dalam table indikator tersebut, Tiongkok merupakan satu dari tiga *region* yang mendapat indikator hijau dalam goals *Zero Hunger*. Dengan kata lain, Persekutuan Bangsa Bangsa serta sektor swasta memandang optimis terhadap Tiongkok yang akan memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Tiongkok sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dalam memenuhi kebutuhan pangan di negaranya dan mencapai *Zero Hunger*, padahal penduduk di Tiongkok sampai sekarang masih mengalami pertumbuhan dan wilayah untuk melakukan peningkatan agrikultur mulai berkurang.

Pada penelitian yang sudah ada sebelumnya, banyak yang mengaitkan ketahanan pangan Tiongkok dengan pertumbuhan penduduk Tiongkok yang sangat cepat. Sebagai contohnya, Chen dalam artikelnya menjelaskan bahwa dalam rangka memberi makan sebanyak 1,3 milyar penduduknya dengan jumlah lahan budidaya (*cultivated land*) per kapita yang jauh di bawah rata rata dunia, Tiongkok sudah mengalami tantangan dalam hal kelangkaan lahan ditambah lagi *growth rate* di Tiongkok yang mencapai 0,35% (UN, World Population, 2019) Sehingga, menurut penelitian Chen, perlu diadakan urbanisasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan penduduk yang membludak (Chen J. , 2007). Argumen ini didukung pula oleh Christiansen yang berpendapat bahwa perkembangan Tiongkok dalam hal perekonomiannya ditentukan dalam hal ketahanan pangan dan produktivitas pertaniannya, namun adanya urbanisasi merupakan salah satu faktor yang menonjol dalam memastikan ketahanan pangan dari Tiongkok sendiri karena kepadatan penduduk dapat menyebabkan hilangnya lahan yang bisa diolah menjadi pertanian, penurunan kualitas lingkungan dan juga penurunan produksi pangan (Christiansen, 2009). Ada pula penelitian Fan yang mengaitkan ketahanan pangan di Tiongkok dengan peningkatan tanaman dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang menganalisis tantangan yang akan dihadapi oleh teknologi agrikultur dalam meningkatkan kualitas tanaman dan pertahanan terhadap kualitas lingkungan dalam rangka peningkatan terhadap ketahanan pangan di Tiongkok (Fan, 2011).

Penelitian ini sendiri bermaksud menjelaskan peningkatan ketahanan pangan Tiongkok dari sisi yang berbeda yaitu setelah adanya *SDGs* yang merupakan lanjutan dari *MDGs* dimana dalam proses pembuatannya diikuti oleh kurang lebih 193 anggota dari Persekutuan Bangsa Bangsa termasuk Tiongkok sendiri. Penelitian ini diharapkan akan memberikan perspektif berbeda bagaimana implementasi dari *global goals/ SDGs* itu sendiri dapat membantu negara yang patuh

secara khusus Tiongkok dalam meningkatkan ketahanan pangan (*food security*) dengan cara mengimplementasikannya dalam kebijakan nasional negaranya yaitu *13th Five Year Plan for Economic and Sosial Development* Tiongkok yang pada akhirnya dapat membuat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini berjalan secara maksimal dan secara spesifik akan membantu Tiongkok dalam meningkatkan ketahanan pangan di negaranya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berupaya menjawab pertanyaan:

1. Mengapa Tiongkok berhasil melakukan implementasi *Sustainable Development Goals* sebagai upaya untuk mencapai *Zero Hunger*?
2. Apakah Tiongkok sudah memenuhi *food security* dalam negerinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui upaya-upaya Tiongkok dalam mencapai goals ke-2 dari *Sustainable Development Goals*. Dalam memenuhi ketahanan pangan di Tiongkok, pemerintah membuat kebijakan domestik yaitu *13th Five Year Plan for Economic and Sosial Development*. Penelitian ini bermaksud untuk melihat impementasi dari kebijakan yang sudah dibuat oleh Tiongkok dalam memenuhi ketahanan pangannya.
2. Mengetahui apakah Tiongkok sudah memenuhi *food security* negaranya. Menurut FAO, suatu negara dikatakan memenuhi ketahanan pangan apabila memenuhi empat standar yaitu *availability*, *accessibility*, *utilization*, dan *stability*. Penelitian ini bermaksud untuk melihat apakah implementasi dari *SDGs* yang sudah dilakukan membuat Tiongkok memenuhi indikator *food security* yang dikeluarkan oleh FAO.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih terkait pemikiran akademis dalam menganalisis suatu fenomena atau permasalahan ketahanan pangan di tingkat nasional dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan di Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini juga

bermanfaat untuk menunjukkan pentingnya suatu negara dalam mengimplementasikan *SDGs* untuk mencapai target target dari *SDGs* secara khusus dalam hal ketahanan pangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

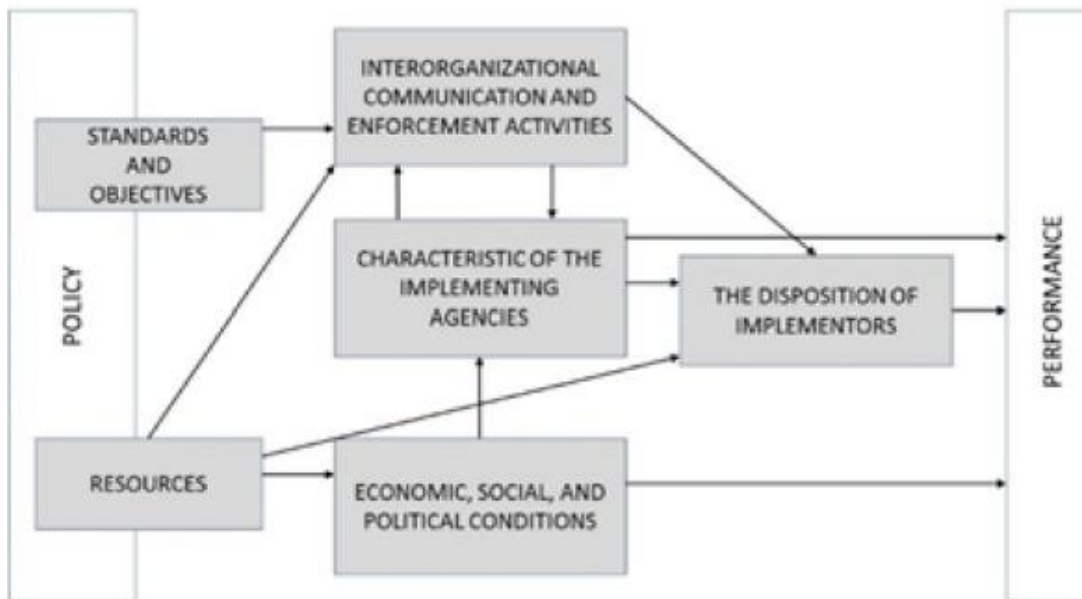
Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran dan analisis bagaimana Tiongkok sebagai negara dengan jumlah penduduk terbananyak di dunia dapat memenuhi ketahanan pangan di negaranya. Hal ini kemudian dapat menjadi acuan bagi negara negara lain yang masih memiliki masalah dalam memenuhi ketahanan pangannya untuk melakukan proses implementasi *SDGs* yang membantu Tiongkok dalam mencapai goals yang ada dalam *SDGs* terutama dalam pemenuhan pangan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pada bagian awal kerangka pemikiran akan dijelaskan mengenai teori maupun konsep implementasi kebijakan. Setelah itu akan dijelaskan mengenai konsep ketahanan pangan yang menjadi dasar untuk menjawab rumusan masalah. Pada bagian ini akan dibagi menjadi empat poin yakni, *availability*, *access*, *utilization*, dan *stability*.

1.5.1. Konsep Implementasi Kebijakan

Gambar 1.2 Model Implementasi Kebijakan Meter dan Horn



Meter & Horn, 1975

Konsep implementasi merupakan tindakan-tindakan dalam keputusan yang mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Meter & Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, 1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik dan dipengaruhi oleh beberapa 6 variabel.

Pertama, standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Namun, jika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu berlebihan, maka akan sulit untuk direalisasikan (Agustino, 2006). Lalu, Van Meter dan Van Horn (Sulaeman 1998) juga menegaskan untuk melakukan pengukuran kinerja implementasi kebijakan dan menegaskan standar sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Kedua, sumber daya. Keberhasilan dari pengimplementasian kebijakan akan bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan apakah implementasi kebijakan akan berhasil atau tidak. Tahap-tahap dari implementasi kebijakan akan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas dan sesuai dengan pekerjaan yang diperlukan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain dari sumber daya manusia, sumber daya finansial juga menjadi salah satu hal yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Ketiga, Karakteristik organisasi pelaksana. Hal ini meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh ciri yang cocok dengan agen pelaksananya. Hal ini juga berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan karena akan diperlukan pelaksana kebijakan yang kompeten agar pengimplementasian dapat berjalan dengan baik.

Keempat, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (Horn & Metter, 1974) sehingga standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan mengenai standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*). Ketika tidak ada kejelasan dan konsistensi dari standar dan tujuan kebijakan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut

Kelima, disposisi atau sikap para pelaksana. Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006), sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi, kebijakan public sendiri biasanya bersifat *top down* dan akan sangat mungkin orang-orang yang mengambil keputusan tidak mengetahui permasalahan yang harus diselesaikan.

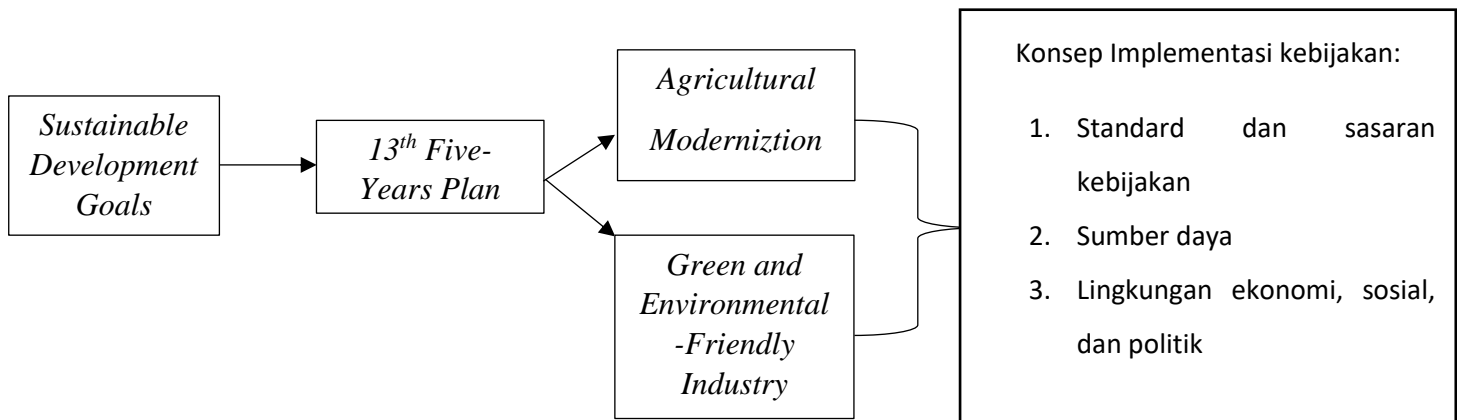
Keenam, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini perlu diperhatikan untuk menilai kinerja dari implementasi kebijakan dan untuk mengetahui bagaimana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan dari kebijakan publik itu sendiri. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang tidak stabil akan menjadi masalah bagi proses pengimplementasian dan dapat menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan.

Menurut pendapat Webster (2001), implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya berbentuk undang-undang, aturan pemerintah atau perintah eksekutif. Namun, Van Mater dan Van Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan semua tindakan yang berlangsung antara penyataan dan perumusan kebijakan dan dampaknya. Hal ini juga termasuk suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan awal dibuatnya kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada proses pelaksanaan suatu kebijakan tetapi juga tindakan atau perilaku individu dan kelompok pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program, namun hal ini juga dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi. Studi implementasi kebijakan ini menambahkan dimensi baru dalam melakukan analisis terhadap suatu kebijakan dan memberi pemahaman baru tentang bagaimana sistem berhasil atau gagal menerjemahkan tujuan kebijakan umum menjadi konkret dan berhasil.

Dalam tulisan ini nantinya penulis akan menggunakan keenam variabel yang ada dalam menganalisis kesuksesan Tiongkok dalam melakukan proses implementasi. Tiongkok sendiri memiliki standar dan sasaran kebijakan, ukuran, dan tujuan kebijakan yang jelas mengenai apa yang ingin Tiongkok capai dalam pemenuhan *Zero Hunger* di negaranya. Selain itu, tidak dapat

dipungkiri bahwa Tiongkok juga memiliki sumber daya baik secara finansial dan teknologi dalam menunjang pencapaian *Zero Hunger*. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dari implementasi kebijakan yang akan dilakukan oleh Tiongkok.

Gambar 1.3 *Way of Thinking*



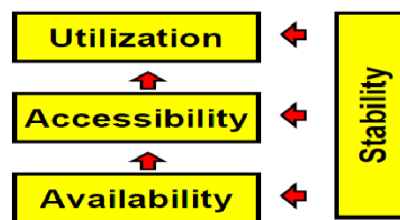
Diolah dari Meter & Horn, 1975

1.5.2. Konsep Ketahanan Pangan (*Food Security*)

Ketahanan pangan terjadi ketika semua orang dalam tiap waktu, memiliki kemampuan secara fisik dan ekonomi untuk mengakses makanan yang bergizi dan cukup yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh mereka untuk mendapatkan hidup yang sehat dan aktif (Summit, 1996) Dengan adanya definisi ini, terdapat empat dimensi dari ketahanan pangan itu sendiri menurut FAO (*Food And Agriculture Organization*). Yang pertama adalah ketersediaan fisik (*availability*) dari makanan. Ketersediaan pangan termasuk dalam hal tingkat produksi pangan, tingkat persediaan, dan perdagangan bersih dari pangan itu sendiri. Yang kedua yaitu akses secara ekonomi terhadap pangan (*access*) yang artinya meskipun terdapat jumlah pangan yang cukup baik dalam skala nasional maupun internasional tidak berarti bahwa kebutuhan akan pangan telah terpenuhi, namun yang paling penting adalah akses orang-orang terhadap pangan itu sendiri yang harus dibantu dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai pendapatan, harga pasar, agar semua orang dapat memenuhi tingkat kebutuhan pangannya dan mencapai konsep ketahanan pangan itu sendiri. Yang ketiga yaitu pemanfaatan (*utilization*) yang dapat diartikan sebagai cara tubuh manusia untuk

mengolah berbagai nutrisi yang ada dalam makanan. Energi yang cukup dalam tubuh manusia akan memberikan efek yang baik tubuh manusia sehingga diperlukan makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Yang terakhir adalah stabilitas (*stability*) atau keseimbangan antara ketersediaan pangan, akses ekonomi dan pemanfaatan dari makanan itu sendiri. Meskipun seorang manusia sudah memenuhi kebutuhannya secara cukup dalam satu hari, orang tersebut tetap dikatakan *food insecure* jika orang tersebut memiliki akses yang tidak memadai terhadap makanan tersebut secara berkala karena akan beresiko dalam memburuknya status gizi orang tersebut. Bahkan, faktor faktor eksternal lain seperti cuaca, ketidakstabilan politik dan ekonomi juga dapat memberikan dampak yang cukup signifikan dalam ketahanan pangan di suatu negara (FAO, An Introduction to the Basic Concepts of Food Security, 2008).

Dalam tulisan ini, penulis akan memakai keempat indikator dari *food security* menurut FAO yaitu *availability*, *accessibility*, *utilization*, dan *stability* karena konsep ketahanan pangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketersediaan pangan (*Availability*) dapat dilihat melalui total pasokan makanan dan *output* makanan perkapita dari Tiongkok sehingga akan terlihat bagaimana pengimplementasian program dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan melalui peningkatan terhadap total pasokan makanan dan *output* makanan perkapita dari Tiongkok. Akses pangan (*Access*) dapat dilihat melalui akses secara ekonomi dan fisik dari hasil pangan yang ada dalam skala nasional dan internasional. Pemanfaatan (*Utilization*) dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan nutrisi dari individu. Stabilitas (*Stability*) yang merupakan gabungan dari ketiga indikator lainnya dapat dilihat tidak hanya dengan ketersediaan dari pangan, tetapi juga adanya akses ekonomi dan fisik serta tingkat kesehatan serta gizi yang baik akibat adanya kualitas pangan yang baik pula. Suatu negara dapat dikatakan tahan terhadap pangan atau memenuhi *food security* ketika keempat dimensi dari *food security* di atas sudah dipenuhi.



Sumber: *Food and Agricultural Organization of the United Nations, 2019*

1.6. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah: kesuksesan dari Tiongkok sebagai negara dengan populasi terbanyak dalam melakukan implementasi dari *SDGs* dalam upaya mencapai *Zero Hunger* di negaranya adalah karena Tiongkok memiliki standard dan sasaran kebijakan yang jelas, sumber daya yang memadai, karakteristik pemerintahan yang baik serta komunikasi antar organisasi yang jelas sehingga dapat membantu Tiongkok dalam upaya upaya yang dilakukan untuk mencapai *Zero Hunger*.

1.7. Metodologi

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe eksplanatif dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Meleong, analisa dengan pendekatan kualitatif nantinya akan dilakukan dengan cara mengorganisasikan data yang dipilah-pilah sehingga dapat dikelola dan disintesis. Kemudian, dicari pola yang ditemukan melalui poin-poin yang penting serta menemukan hal hal yang dapat dideskripsikan atas dasar data dan poin poin tersebut. Jangkauan waktu penelitian ini dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan alasan, pada tahun 2015 *MDGs* berakhir dan digantikan *SDGs* pada tahun 2016. Terlebih dari pada itu, Tiongkok mulai melakukan proses implementasi kebijakan dan menerbitkan garis besar kebijakannya pada tahun 2016 hingga tahun 2020, namun karena data tahun 2020 baru akan disempurnakan pada 2021, maka penelitian ini akan menganalisis implementasi kebijakan yang dilakukan Tiongkok hingga tahun 2019. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan sumber data yang merujuk pada jurnal, buku, artikel, situs dan berita terkait.

1.7.2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1984).

1. Reduksi data merupakan langkah awal penulis untuk memilih dokumen dan sumber lainnya sehingga dapat lebih terfokus ke permasalahan yang akan dibahas.
2. Penyajian data yaitu langkah pengolahan data yang sudah didapatkan kemudian disusun menjadi sebuah bentuk grafik, table, maupun narasi.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah akhir dimana dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan melakukan verifikasi data. Mengingat hipotesis yang diberikan di awal bersifat sementara dan dapat berubah jika sudah mendapatkan data pendukung, maka dilakukan proses verifikasi data untuk mendapatkan bukti bukti yang kuat agar pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan yang kredibel.

1.8. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang merupakan desain riset dari penelitian ini. Bab 2 adalah deskripsi mengenai standar dan sasaran kebijakan, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam hal pangan. Bab ini akan fokus dalam memperlihatkan kapabilitas Tiongkok yang dapat digunakan dalam melakukan implementasi kebijakan. Selain itu, bab ini juga akan memperlihatkan ketersediaan pangan yang ada di Tiongkok, serta kemampuan ekonomi masyarakat di Tiongkok untuk mendapatkan ketersediaan pangan serta tingkat kesehatan dan gizi di Tiongkok. Bab 3 merupakan analisis untuk melihat alasan mengapa Tiongkok dapat mencapai *Zero Hunger* dan kenapa implementasi kebijakan dapat membantu Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Bab ini akan berisi analisis dari tulisan dan pernyataan dari peneliti lain yang sejalan dengan topik penelitian ini. Secara khusus, bab ini akan berupaya melihat apakah Tiongkok memang sudah memenuhi indikator indikator yang diperlukan agar suatu negara dapat dikatakan memenuhi *food security*-nya. Bab 4 pada akhirnya merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran untuk penelitian lebih lanjut.